

Pengaruh Dana Desa, Upah Minimum, dan Pengangguran terhadap Pengentasan Kemiskinan Ekonomi di 18 Kabupaten Provinsi Jawa Barat

Muhammad Ilham*, Ade Yunita Mafruhah

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*milham05023@gmail.com, ade.yunita.mafruhah@unisba.ac.id

Abstract. *Poverty is a problem in various regions, be it villages, cities, and even countries. Policy after policy has been launched in order to eliminate poverty in the region, be it the village fund programme, the increase in minimum wage, and the reduction of unemployment. Therefore, this study aims to analyse how the influence of village funds, minimum wages and unemployment on poverty alleviation in 18 districts in West Java Province. This research uses descriptive quantitative methods using secondary data in the form of panel data. The secondary data has been processed and published by relevant institutions related to this research, Panel data, which is characterised by cross-sectional and time-series dimensions, is used to improve data quality and quantity. This study found that the village fund variable has no significant effect on poverty with a significance value of $(0.113 > 0.05)$, the drinking wage variable shows that it has a significant effect on poverty with a value of $(0.000 < 0.05)$, the unemployment variable shows that it has no significant effect on poverty with a significance value of $(0.692 > 0.05)$. Based on the results of the F (simultaneous) test in the study using the panel data regression test, it can be concluded that simultaneously or together the variables of village funds, minimum wages, and unemployment have a significant effect on the poverty variable in 18 districts of West Java Province in 2015-2022.*

Keywords: *Community Empowerment and Poverty.*

Abstrak. Kemiskinan menjadi permasalahan diberbagai daerah baik itu desa, kota, bahkan negara sekalipun. Kebijakan demi kebijakan telah diluncurkan demi menghilangkan kemiskinan di daerah, baik itu dengan ada program dana desa, Kenaikan Upah Minimum, dan Pengurangan Pengangguran. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh dana desa, upah minimum dan Pengangguran terhadap pengentasan kemiskinan di 18 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder berupa data panel. Data sekunder tersebut telah diolah dan dipublikasikan oleh lembaga-lembaga terkait yang berhubungan dengan penelitian ini, Data panel, yang dicirikan oleh dimensi cross-sectional dan time-series, digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas data. Penelitian ini menemukan bahwa variable dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai signifikansi $(0,113 > 0,05)$, variable upah minum menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai $(0,000 < 0,05)$, variable pengangguran menunjukkan bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai signifikansi $(0,692 > 0,05)$, dan Berdasarkan hasil uji F (simultan) pada penelitian dengan menggunakan uji regresi data panel, dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel dana desa, upah minimum, dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan di 18 Kabupaten Provinsi Jawa barat tahun 2015-2022.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Masyarakat dan Kemiskinan.*

A. Pendahuluan

Kemiskinan telah muncul sebagai tantangan mendasar yang perlu diperhatikan secara cermat, di berbagai daerah baik itu kota maupun desa, sehingga mendorong pemerintah untuk menerapkan berbagai kebijakan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang mendesak ini. Kemiskinan merupakan salah satu indikator utama dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), yang menggaris bawahi komitmen global untuk mengatasi kemiskinan dalam segala bentuk dan di semua wilayah (Sigit & Kosasih, 2020). Kemiskinan pada hakikatnya keadaan tertekan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, yang berasal dari ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup atau kegagalan pemerintah memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, selama periode kuartal I 2017-kuartal I 2022 angka kemiskinan menunjukkan tren turun, meski sempat meningkat pada 2020 akibat pandemi Covid-19. Pada Maret 2022, persentase penduduk miskin di Indonesia adalah 9,54%, menurun 0,17 persen poin dibandingkan September 2021 dan menurun 0,60 persen poin dibandingkan Maret 2021. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 adalah sekitar 26,16 juta orang, menurun 0,34 juta orang dibandingkan September 2021 dan menurun 1,38 juta orang dibandingkan Maret 2021. Meski ada penurunan, namun kondisi ini masih menjadi tantangan dalam upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah satu tantangan tersebut adalah masih tingginya tingkat kemiskinan di berbagai daerah, oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak akan upaya-upaya bersama untuk mendorong pembangunan ekonomi, memberdayakan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan dan mencapai kemakmuran, kemudian masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat yang lainnya (Nabibah & Hanifa, 2022).

Pemerintah telah mengimplementasikan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap sumber daya ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan salah satunya Program dana desa, kenaikan upah, dan menyediakan lapangan pekerjaan, namun masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses. Sayangnya, inisiatif-inisiatif tersebut belum berjalan dengan baik, sehingga mengakibatkan sejumlah besar masyarakat miskin masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, masih terdapat tantangan dalam mengakses layanan publik, dan terdapat kesenjangan dalam pengelolaan sumber daya, yang mengindikasikan adanya potensi peningkatan kemiskinan (Sugiyono, 2021).



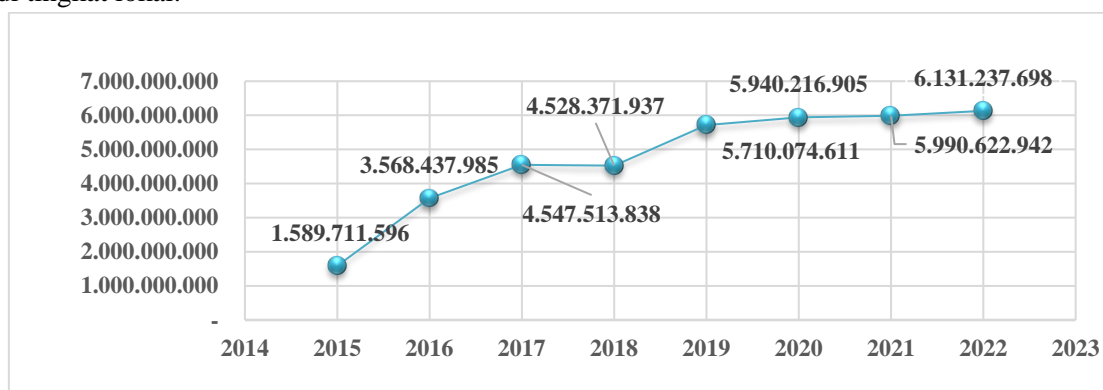
Sumber : (BPS Jawa Barat, 2023)

Gambar 1. 1 Presentase Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2022

Data yang disajikan dalam Gambar 1.1 menunjukkan jumlah kemiskinan dalam persentase di Jawa Barat dari tahun 2015 hingga 2022. Data ini menunjukkan bahwa jumlah kemiskinan di Jawa Barat mengalami fluktuasi selama periode tersebut, namun penurunan tersebut masih belum bisa menyelesaikan masalah kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Meskipun

terjadi penurunan tingkat kemiskinan dari tahun 2015 hingga 2022, tingkat kemiskinan mengalami peningkatan pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh dampak global pandemi *COVID-19* yang melanda hampir semua provinsi di Indonesia bahkan berbagai negara.

Pengalihan dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan konsekuensi dari otonomi daerah. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah desa untuk menjalankan kebijakan Dana Desa secara transparan dan akuntabel, serta memastikan keselarasannya dengan pedoman yang telah dibuat oleh perangkat desa dan masyarakat. Dalam konteks ini, partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dan penggunaan Dana Desa menjadi kunci kesuksesan implementasi otonomi daerah. Pemerintah desa perlu mendorong keterlibatan warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan di tingkat lokal.



Sumber : (Kementerian Keuangan,2022)

Gambar 2. Jumlah Dana Desa di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2022

Pada rincian Dana Desa (DD) di Provinsi Jawa Barat periode 2015-2022. Gambar 2 tersebut terdiri dari 8 tahun terakhir di Provinsi Jawa Barat. Dalam catatan Kemenkeu perkembangan Dana Desa pada tahun 2015-2022 di Provinsi Jawa Barat secara umum menunjukkan trend yang positif, hal ini bisa dilihat pada tabel di atas. Namun besarnya pengalokasian dana desa ini masih menyisakan penduduk miskin, hal ini bisa dilihat ditabel persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “ Bagaimana pengaruh dana desa, upah minimum, dan pengangguran terhadap kemiskinan di 18 Kabupten Provinsi Jawa barat? Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk menganalisis pengaruh dana desa, upah minimum, dan pengangguran terhadap kemiskinan di 18 Kabupaten Provinsi Jawa Barat.
2. Mengidentifikasi seberapa besar pengaruh dana desa, upah minimum, dan pengangguran terhadap kemiskinan di 18 Kabupaten Provinsi Jawa Barat

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder berupa data panel. Data sekunder tersebut telah diolah dan dipublikasikan oleh lembaga-lembaga terkait yang berhubungan dengan penelitian ini, khususnya BPS Provinsi Jawa Barat dan DJPK Kementerian Keuangan. Data panel, yang dicirikan oleh dimensi cross-sectional dan time-series, digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas data. Kombinasi ini memungkinkan pendekatan yang tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan salah satu jenis data saja, seperti yang disoroti oleh (Widarjono, 2015). Penelitian

ini berfokus pada empat variabel independen-dana desa, upah minimum, pengangguran, dan variable dependen kemiskinan di 18 Kabupaten Provinsi Jawa Barat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Interaksi antara Dana Desa, kebijakan upah minimum, dan tingkat pengangguran memainkan peran penting dalam membentuk lanskap sosial-ekonomi suatu daerah. Dalam konteks Provinsi Jawa Barat, salah satu pusat perekonomian terkemuka di Indonesia, faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap dinamika kemiskinan. Selama periode 2015-2022, Dana Desa telah muncul sebagai alat kebijakan yang sangat penting untuk mengarahkan inisiatif pembangunan di tingkat akar rumput. Pada saat yang sama, peraturan upah minimum dan tingkat pengangguran secara signifikan memengaruhi daya beli dan prospek pekerjaan penduduk. Studi ini berupaya untuk menggali hubungan yang rumit antara Dana Desa, dinamika upah minimum, dan tingkat pengangguran, yang bertujuan untuk mengungkap dampak gabungan dari ketiga hal tersebut terhadap tren kemiskinan di 18 kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 1. Hasil Uji Data Penel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20322727	502717.6	40.42573	0.0000
X1	0.000532	0.000333	1.596580	0.1134
X2	-0.009349	0.001292	-7.237539	0.0000
X3	1.811016	4.562739	0.396914	0.6922

Sumber: Hasil olah data Eviews 12

Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan di 18 Kabupaten Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 1, menunjukkan bahwa Dana Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai signifikansi ($0,113 > 0,05$), serta berdasarkan uji 2 sisi pada uji signifikansi parametrik individual (uji T) menunjukkan bahwa nilai T hitung $< T$ tabel ($1,596 < 1,655$). Artinya pada model regresi ini hipotesis H_0 1 diolak dan H_0 1 diterima, hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara dana desa terhadap kemiskinan tidak berpengaruh signifikan. Hal ini disebabkan oleh alokasi Dana Desa yang lebih banyak digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik desa, dan kurang memperhatikan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan inisiatif pemberdayaan ekonomi sangat terbatas. Selain itu, kualitas yang kurang optimal dari sarana dan prasarana yang dibangun dapat ditelusuri kembali ke kekurangan dalam keterampilan manajemen teknis, yang mencakup perencanaan dan pelaksanaan.

Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan di 18 Kabupaten Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 1, menunjukkan bahwa Upah Minimum berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai ($0,000 < 0,05$), serta berdasarkan uji 2 sisi pada uji signifikan parametrik individual (uji T) dengan nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel ($7,737 > 1,665$, ini mempunyai arti bahwa H_0 3 ditolak dan H_0 3 diterima. Dari hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan upah minum terhadap berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Artinya, semakin tinggi upah minimum, maka semakin rendah tingkat kemiskinan. Hal ini dapat dijelaskan dari teori ekonomi bahwa upah minimum dapat meningkatkan pendapatan pekerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi mereka. Dengan meningkatnya daya beli dan konsumsi, maka permintaan terhadap barang dan jasa juga akan meningkat. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.

Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan di 18 Kabupaten Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 1, menunjukkan bahwa Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai signifikansi ($0,692 > 0,05$), serta

berdasarkan uji 2 sisi pada uji signifikansi parametrik individual (uji T) menunjukkan bahwa nilai T hitung $< T$ tabel ($0,0396 < 1,655$). Yang artinya pada model regresi ini hipotesis H_1 diolok dan H_0 diterima, hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah pengangguran terhadap kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan. Artinya, semakin tinggi jumlah pengangguran, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan. Keberhasilan mengurangi kemiskinan bergantung pada penciptaan lapangan kerja yang dapat menyerap angkatan kerja saat ini, terutama di sektor-sektor padat karya. Selain itu, lapangan kerja ini harus didistribusikan ke seluruh kelompok pendapatan, termasuk kelompok masyarakat.

Pengaruh Dana Desa, Upah Minimum, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di 18 Kabupaten Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan penelitian dengan model regresi data panel menggunakan uji signifikansi simultan (F) menunjukkan bahwa nilai Signifikan $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $184,19 > F$ table $2,67$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diestimasi layak untuk menjelaskan pengaruh dana desa, Umpah Minimum, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di 18 Kabupaten Provinsi Jawa barat 2015-2022. Dengan demikian hubungan antara variabel bebas (X_1, X_2, X_3) terhadap variabel terikat (Y) secara bersama-sama berpengaruh signifikan. Berdasarkan analisis koefisien determinasi diperoleh nilai (R^2) sebesar $0,972$. Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antar variabel baik variabel bebas (dana desa, upah minum dan jumlah pengangguran) dengan variabel terikat (Kemiskinan) memiliki kontribusi sebesar $97,20\%$, sisanya dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak dimaksud dalam penelitian ini.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian dengan judul “pengaruh dana desa, upah minimum, dan pengangguran terhadap pengetasan kemiskinan ekonomi di 18 Kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2022”, kesimpulan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis secara parsial variable dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai signifikansi ($0,113 > 0,05$), serta berdasarkan uji 2 sisi pada uji signifikansi parametrik individual (uji T) menunjukkan bahwa nilai T hitung $< T$ tabel ($1,596 < 1,655$). Penggunaan dana desa di bidang pembangunan desa secara parsial berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Namun, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan dana desa untuk pembangunan desa tidak dapat secara langsung mengurangi kemiskinan. Dana Desa hanya merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan.
2. Berdasarkan hasil analisis secara parsial variable upah minum menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai ($0,000 < 0,05$), serta berdasarkan uji 2 sisi pada uji signifikan parametrik individual (uji T) dengan nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel ($7,737 > 1,665$). Tinggi nya upah minimum, maka semakin rendah tingkat kemiskinan. Hal ini dapat dijelaskan dari teori ekonomi bahwa upah minimum dapat meningkatkan pendapatan pekerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi mereka. Dengan meningkatnya daya beli dan konsumsi, maka permintaan terhadap barang dan jasa juga akan meningkat.
3. Berdsarkan hasil analisis secara parsial variable pengangguran menunjukkan bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai signifikansi ($0,692 > 0,05$), serta berdasarkan uji 2 sisi pada uji signifikansi parametrik individual (uji T) menunjukkan bahwa nilai T hitung $< T$ tabel ($0,0396 < 1,655$). Semakin tinggi jumlah pengangguran, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan, Pengangguran tinggi juga dapat berdampak pada peningkatan kriminalitas. Hal ini karena masyarakat yang menganggur dan tidak memiliki penghasilan yang tetap akan cenderung melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhannya.
4. Berdasarkan hasil uji F (simultan) pada penelitian dengan menggunakan uji regresi data panel, dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel dana desa, upah minimum, dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan

di 18 Kabupaten Provinsi Jawa barat tahun 2015-2022.

Acknowledge

Pada Kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Teti Sumarni dan Bapa Masrul Hamid yang tidak pernah lelah untuk memberikan doa dan melimpahkan semua kasih sayang, semangat, perhatian, dorongan kepada peneliti baik berupa moril maupun material, sehingga dapat menempuh jenjang perkuliahan sampai saat ini.
2. Kakak-kakak ku Irma juwita, Nurfitri Handayani, dan Hidata Hendra Kusuma yang telah memberikan doa, semangat, motivasi, dan dukungan kepada peneliti. Kakak iparku Andi Rohendi, Fajar Maulana dan Rieke Novyanti Pratiwi, dan ketiga ponakanku Syifa, Dafa, Arfa, dan Zea yang selalu memberikan keceriaan, kebahagiaan dan semangat
3. Prof. Dr. H. Edi Setiadi, SH., MH., selaku **Rektor Universitas Islam Bandung**.
4. Dr. Ima Amaliah, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan. Telah membant saya dalam perkuliahan maupun tugas akhir.
5. Ade Yunita Mafrohat, S.E., M.Soc.Sc selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, motivasi, bimbingan serta meluangkan waktu untuk peneliti dalam penyusunan ini.
6. Prof. Dr. Atih Rohaeti Dariah, S.E., M.Si. yang mambantu saya selama kuliah dan memberikan saya kesempatan untuk bisa mengikuti penelitian bersama ibu selama perkuliahan dan banyak sekali ilmu yang telah diberikan kepada saya

Daftar Pustaka

- [1] Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia,” *Indones. Treas. Rev. J. Perbendaharaan Keuang. Negara dan Kebijak. Publik*, vol. 5, no. 2, pp. 105–119, 2020, doi: 10.33105/itrev.v5i2.170.
- [2] E. T. Nabibah and N. Hanifa, “Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur,” *Indep. J. Econ.*, vol. 2, no. 3, pp. 1–13, 2022, doi: 10.26740/independent.v2n3.p1-13.
- [3] Sugiyono, “Pengaruh Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan Penduduk Desa,” *J. Kaji. Ilm.*, vol. 21, no. 2, pp. 219–228, 2021, doi: 10.31599/jki.v21i2.540.
- [4] A. Z. Lestari, “Analisis Faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Jawa Barat (Periode 1995-2008),” *Ekon. dan Bisnis*, pp. 1–150, 2019.
- [5] F. Panuluh, “Buku Pintar Dana Desa,” *Propos. SIMLITAMAS*, pp. 8–37, 2020, [Online]. Available: https://drive.google.com/open?id=1_noSAVSk9r0fSwkPSxzMLUcN-0NQ0hbl
- [6] S. eida Rosalia, “Pegaruh Pengangguran dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di provinsi aceh,” 2019.
- [7] Ainul hayati, “Analisis resiko kemiskinan rumah tangga di provinsi banten,” 2012.
- [8] L. Sulastri, “ANALISIS PENGARUH DANA DESA TERHADAP PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN (MUBA),” *NBER Work. Pap.*, p. 89, 2022, [Online]. Available: <http://www.nber.org/papers/w16019>
- [9] D. Kurniawan, *Tabel Distribusi*. 2008.
- [10] K. Chasanah, S. Rosyadi, and D. Kurniasih, “Implementasi Kebijakan Dana Desa,” *Indones. J. Public Adm.*, vol. 3, no. 2, pp. 12–32, 2017, doi: 10.52447/ijpa.v3i2.921.
- [11] Sulistiyono, “Pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga pada kabupaten/kota di provinsi lampung tahun 2013 - 2015,” Sulistiyono, p. 21, 2019.
- [12] R. Maulana, A. J. Pitoyo, and M. A. F. Alfana, “Analisis Pengaruh Kemiskinan dan Kondisi Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017,” *Media Komun. Geogr.*, vol. 23, no. 1, pp. 12–24, 2022, doi: 10.23887/mkg.v23i1.39301.
- [13] N. M. Chairunnisa and Y. N. Qintharah, “Pengaruh Kesehatan, Tingkat Pendidikan, dan

- Upah Minimum terhadap Kemiskinan pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020,” *J. Penelit. Teor. Terap. Akunt.*, vol. 7, no. 1, pp. 147–161, 2022, doi: 10.51289/peta.v7i1.530.
- [14] S. Sarbaini, Z. Zukrianto, and N. Nazaruddin, “Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Pembangunan Rumah Layak Huni Di Provinsi Riau Menggunakan Metode Analisis Regresi Sederhana,” *J. Teknol. dan Manaj. Ind. Terap.*, vol. 1, no. 3, pp. 131–136, 2022, doi: 10.55826/tmit.v1i3i3.46.
- [15] P. R. Sihombing, D. Muslianti, and Yunita, “RETRACTION NOTICE TO ‘Apakah Dana Desa dan Fungsi Belanja APBD Mampu Mengatasi Kemiskinan di Indonesia?’,” *J. Ekon. Dan Stat. Indones.*, vol. 2, no. 2, pp. 236–243, 2022, doi: 10.11594/jesi.02.02.12.
- [16] R. Martini, E. Widyastuti, S. Hartati, Zulkifli, R. Mayasari, and Mardhiah, “Poverty in South Sumatra Province Is Viewed From Village Fund and Village Fund Allocation,” *Proc. 4th Forum Res. Sci. Technol.*, vol. 1, pp. 100–107, 2021, doi: 10.2991/ahsseh.k.210122.018.
- [17] H. Hardianto, “Determinasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberantasan Kemiskinan Desa: Analisis Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa (Literature Review Manajemen Keuangan),” *J. Manaj. Pendidik. Dan Ilmu Sos.*, vol. 3, no. 1, pp. 266–275, 2022, doi: 10.38035/jmpis.v3i1.872.
- [18] A. Relevansi et al., “*Jurnal Indonesia Sosial Sains*,” vol. 3, no. 4, pp. 708–719, 2019, doi: 10.36418/jiss.v3i4.571.
- [19] T. D. Aprilsesa, M. Tahir, and S. Aminah, “Tinjauan Pelaksanaan Pemberian Upah pada Buruh Dibawah Upah Minimum,” vol. 5, no. 1, pp. 585–592, 2023, doi: 10.37680/almanhaj.v5i1.1997.
- [20] M. Fandrian and S. Rohmah, “Paradoks Implementasi Kebijakan Upah Minimum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi PENDAHULUAN Hubungan hukum yang mengikat antara pekerja dengan pengusaha yaitu hubungan kerja yang memiliki tiga unsur yang harus terpenuhi yaitu pekerjaan , perintah , dan upa,” vol. 12, no. 1, pp. 175–194, 2020.
- [21] J. Rahmi, “DAMPAK UPAH MINIMUM TERHADAP PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA : STUDI KASUS INDUSTRI MANUFAKTUR INDONESIA (The Impact of Minimum Wage on Labor Productivity : Evidence from Indonesian Manufacturing Industry),” vol. 13, no. 1, pp. 1–12, 2019.
- [22] H. W. Utami, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Pendidikan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2013,” *EKOSIANA J. Ekon. Syari’ah*, vol. 4, no. 01, pp. 11–20, 2018, doi: 10.30957/ekosiana.v4i01.41.
- [23] U. N. Faizah and N. Woyanti, “Analisis Pengaruh Pendidikan, Partisipasi Kerja, Dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Di Provinsi Banten Tahun 2011-2020,” *BISECER (bus. Econ. Entrep.*, vol. 6, no. 1, p. 48, 2020, doi: 10.61689/bisecer.v6i1.386.
- [24] I. T. dan R. Herawati, “Menuju Upah Layak,” 2017.
- [25] Lara, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan Saman,” *הארץ*, vol. 5, no. 8.5.2017, pp. 2003–2005, 2022, [Online]. Available: www.aging-us.com
- [26] R. K. R. Syahputri and L. W. P. Fisabilillah, “Pengaruh Pengangguran, Upah Minimum, Dan PDRB Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur,” *Indep. J. Econ.*, vol. 2, no. 2, pp. 169–184, 2023, doi: 10.26740/independent.v2i2.50990.
- [27] M. R. Muslim, “Pengangguran terbuka dan determinannya,” vol. 15, pp. 171–181, 2014.
- [28] A. Soejoto, “Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur,” pp. 1–15, 2017.
- [29] M. E. S. A. Khodijah Ishak, SH.I, “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGANGGURAN DAN INFLIKASINYA TERHADAP INDEK PEMBANGUNAN DI INDONESIA,” pp. 22–38, 2017.

- [30] M. T. Suci Rahmalia, Ariusni, “PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PENGANGGURAN, DAN KEMISKINAN TERHADAP KRIMINALITAS DI INDONESIA,” *J. Kaji. Ekon. dan Pembang.*, no. 3, 2019.
- [31] S. Aulia, P. Kimia, and U. Riau, “Teori Pengetahuan dan Kebenaran dalam Epistemologi,” *vol. 5, no. 3*, pp. 242–249, 2022.
- [32] R. Armin, N. F. Isnaini, and E. Sutrisno, “Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pengentasan Kemiskinan Melalui Metode Common Effect Model,” *J. Ekon. Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digit. dan Kewirausahaan*, vol. 1, no. 1, pp. 89–106, 2022.
- [33] L. Priseptian and W. P. Primandhana, “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan,” *vol. 24, no. 1*, pp. 45–53, 2022.
- [34] D. Dwisusilowati, “PENGARUH UPAH MINIMUM DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN JAWA TIMUR,” 2018.
- [35] Aprilia, “Pengaruh Upah Minimum Terhadap Kemiskinan,” *J. Ilm. Mhs. Fak. Ekon. dan Bisnis*, pp. 1–19, 2016.
- [36] A. P. Suman, “PENGARUH UPAH MINIMUM TERHADAP PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2011-2016,” pp. 1–20, 2016.
- [37] K. Pendapatan and S. Barat, “Ecosains : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan Analisis Korelasi antara Pengangguran , Kemiskinan , dan,” *vol. 11, no. November*, pp. 90–97, 2020.
- [38] H. S. Putra, “Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Aceh,” *J. Anal. Kebijak.*, vol. 2, no. 2, 2019, doi: 10.37145/jak.v2i2.30.
- [39] M. I. Syuhada, “ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM), PDRB DAN UPAH MINIMUM TERHADAP KEMISKINAN STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA DI PULAU JAWA,” *Rabit J. Teknol. dan Sist. Inf. Univrab*, vol. 1, no. 1, p. 2019, 2019, [Online]. Available: http://www.ghbook.ir/index.php?name=فرهنگ و رسانه های نوین&option=com_dbook&task=readonline&book_id=13650&page=73&chckhash=ED9C9491B4&Itemid=218&lang=fa&tmpl=component%0Ahttp://www.albayan.ae%0Ahttps://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&q=APLIKASI+PENGENA
- [40] S. S. Putrizain, A. Saefullah, E. Muriany, A. Agustina, M. Muksin, and C. Rahmi, “Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten,” *vol. 05, no. 01*, pp. 70–83, 2022.
- [41] S. Romi and E. Umiyati, “Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kemiskinan di Kota Jambi,” *e-Jurnal Perspekt. Ekon. dan Pembang. Drh.*, vol. 7, no. 1, pp. 1–7, 2018, doi: 10.22437/pdpd.v7i1.4439.
- [42] L. N. Aini and S. N. Islamy, “Dampak pengangguran, pendidikan, kesehatan, PDRB dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Indonesia,” *J. Econ. Res. Policy Stud.*, vol. 1, no. 3, pp. 132–141, 2021, doi: 10.53088/jerps.v1i3.325.
- [43] D. Diah Retnowati, “PENGARUH PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI JAWA TENGAH Oleh,” pp. 608–618, 2017.
- [44] A. W. Munandar, “Laporan DPMPD Provinsi Jawa Barat,” *DPMPD*, no. 8.5.2017, pp. 2003–2005, 2022.
- [45] D. M. Handayani and W. Syafitri, “Analisis Pengaruh Penggunaan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Kediri,” *J. Ilm. Mhs. FEB*, vol. 5, no. 3, pp. 55–78, 2019, [Online]. Available: <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6174>
- [46] Afifah Rizkia, & Ria Haryatiningsih. (2023). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terdidik Kota Besar di Pulau Jawa. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 125–132. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i2.2821>
- [47] Ahmad Kholik, & Dewi Rahmi. (2023). Strategi Pengembangan UMKM Makanan dan Minuman di Kelurahan Tamansari Kota Bandung. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 133–142. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i2.2796>